



**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial melalui penetapan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran target yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan di Komisi Yudisial untuk menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta sebagai dasar melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Penetapan IKU Komisi Yudisial bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Yudisial yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ketua Komisi Yudisial menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Komisi Yudisial dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- (2) Pejabat Eselon I Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan IKU Eselon I sesuai Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- (3) Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Pasal 4

- (1) Ketua Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang berorientasi pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
- (2) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial memiliki wewenang dan tugas:
 - a. melakukan pembinaan dan monitoring terhadap penyusunan laporan kinerja di setiap unit kerja; dan
 - b. melakukan pengembangan IKU dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang andal.

- (3) Pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Ketua Komisi Yudisial.

Pasal 5

- (1) Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap capaian IKU Komisi Yudisial dilakukan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II di Komisi Yudisial dan disampaikan kepada Ketua Komisi Yudisial.
- (2) Laporan kinerja dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial.

Pasal 6

- (1) Setiap unit kerja wajib melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan berdasarkan faktor pendukung, hambatan dan informasi lainnya.
- (3) Dalam hal analisis dan evaluasi IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial melaporkan kepada Ketua Komisi Yudisial untuk menentukan arah perbaikan.

Pasal 7

Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juli 2020

PLT. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,



R. ADHA PAMEKAS

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks integritas hakim	Skor Indeks Integritas Hakim	1. Rekapitulasi laporan hakim yang diberi sanksi 2. Rekapitulasi jumlah laporan masyarakat yang masuk 3. Rekapitulasi jumlah permohonan pemantauan 4. Rekapitulasi jumlah laporan <i>contempt of court</i> 5. Rekapitulasi hasil survey terbatas kepada hakim
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" ditahun 2024	Skor Indeks RB	Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L
		Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja	Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT JENDERAL

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor nilai kualitas pengawasan hakim	1. Rekapitulasi jumlah laporan masyarakat yang ditangani sampai dengan putusan 2. Skor kepuasan masyarakat pelapor
2	Memperkuat Kapasitas Hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	a. jumlah hakim yang dikenakan sanksi oleh KY/jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPHx100% b. jumlah hakim yang lulus uji kelayakan/jumlah hakim yang mendaftar SCHA x 100% $\frac{\text{hasil a} + \text{hasil b}}{2}$	1. Rekapitulasi jumlah hakim yang dikenakan sanksi 2. Rekapitulasi jumlah hakim yang mendapatkan pelatihan KEPPH 3. Rekapitulasi jumlah hakim yang lulus uji kelayakan SCHA 4. Rekapitulasi jumlah hakim yang mendaftar SCHA
3	Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	Kualitas profil hakim sesuai dengan standar	jumlah data hakim sesuai standart/jumlah data hakim yang direkam jejak x 100%	rekapitulasi data hakim
4	Terlaksananya pemberdayaan Stakeholder dan Publik	Persentase kontribusi <i>stakeholders</i> KY dan Publik	jumlah kontribusi stakeholder dan publik/jumlah stakeholder dan publik KY x 100%	Rekapitulasi jumlah <i>stakeholders</i> dan publik KY
5	Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga	jumlah aplikasi yang dimanfaatkan/jumlah aplikasi dihasilkan x100%	Rekapitulasi jumlah aplikasi yang dihasilkan

SEKRETARIAT JENDERAL

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
6	Terkelolanya Organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	Skor predikat pengelolaan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kinerja penghubung 2. Rekapitulasi sarpreas sesuai kebutuhan 3. nilai kepuasan layanan umum 4. nilai pengelolaan arsip oleh ANRI 5. nilai kepuasan layanan keuangan 6. hasil kepuasan layanan kepegawaian 7. nilai kepuasan layanan perkantoran 8. Rekapitulasi jumlah kerjasama sesuai kebutuhan 9. nilai maturias SPIP 10. nilai PMPRB
7	Meningkatnya profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	skor Indeks profesionalisme pegawai	hasil penilaian dari Menpan dan BKN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Terlaksananya Layanan Perencanaan yang efektif dan efisien	Prosentase keselarasan penyusunan rencana kerja dengan renstra	Jumlah rencana kerja yang selaras dengan renstra/jumlah rencana kerja yang diajukanx100%	1. Rekapitulasi data rencana kerja yang ditetapkan 2. Rekapitulasi data rencana kerja yang diajukan Biro Pusat
		Prosentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun	data anggaran kegiatan yang sesuai dengan rencana sampai dengan akhir tahun anggaran/data anggaran yang direncanakan di awal tahun anggaran x 100%	1. Rekapitulasi data anggaran di akhir tahun 2. Rekapitulasi data anggaran di awal tahun
2	Terlaksananya monitoring evaluasi perencanaan, anggaran dan kinerja	Persentase rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang ditindaklanjuti/Jumlah rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang diajukan x 100%	1. Rekapitulasi rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja 2. Rekapitulasi Jumlah rekomendasi evaluasi atas pelaksanaan perencanaan, anggaran dan kinerja yang diajukan
3	Terlaksananya manajemen organisasi dan tata laksana	Persentase dokumen evaluasi organisasi yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen evaluasi organisasi yang ditindaklanjuti/jumlah dokumen evaluasi organisasi yang diajukanx100%	1. Rekapitulasi jumlah dokumen evaluasi organisasi yang ditindaklanjuti 2. Rekapitulasi jumlah dokumen evaluasi organisasi yang diajukan
		Persentase proses bisnis dan SOP yang dihasilkan	Jumlah proses bisnis dan SOP yang disetujui/jumlah yang diajukanx100%	1. Rekapitulasi Jumlah proses bisnis dan SOP yang disetujui 2. Rekapitulasi Jumlah proses bisnis dan SOP yang diajukan
		Persentase kenaikan nilai RB KY	skor nilai RB	skor nilai RB

BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
4	Tersedianya produk hukum, bantuan hukum, dan dokumentasi hukum	Presentase produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH	jumlah produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH/jumlah produk hukum yang diterima	1. rekapitulasi jumlah produk hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan di JDIH 2. rekapitulasi jumlah produk hukum yang diterima
5	Meningkatnya kualitas hasil audit	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang diusulkan x 100%	Rekapitulasi jumlah rekomendasi hasil audit APIP
		Persentase rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti	jumlah rekomendasi hasil temuan BPK yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi hasil temuan yang diusulkan x 100%	Rekapitulasi jumlah rekomendasi hasil temuan BPK
		Persentase hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti	jumlah hasil reviu APIP yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi hasil reviu APIP yang diusulkan x100%	Rekapitulasi data hasil reviu APIP
		Peningkatan nilai maturitas SPIP	skor nilai maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP	nilai maturitas SPIP

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

BIRO UMUM

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Meningkatnya kerjasama dan hubungan antar lembaga	Persentase kerjasama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim	(Jumlah kerjasama dengan konten integritas hakim : Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti) x 100%	1. Rekapitulasi jumlah kerjasama dengan konten integritas hakim 2. Rekapitulasi Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti
2	Meningkatnya kualitas layanan internal	Penilaian penghubung berkinerja baik	<p>(Hasil skor Internal [70%] + Hasil skor Eksternal/Survei [30%] : 2)</p> <p>Skor Internal didapat dari rata-rata penjumlahan persentase capaian es-III:</p> <ul style="list-style-type: none"> % Kualitas Pemantauan dan Pengawasan yang dilakukan penghubung %Kualitas laporan masy yang selesai ditangani di level penghubung % Kualitas laporan advokasi yang selesai ditangani di level penghubung % Kualitas pelaksanaan rekam jejak dilakukan penghubung berdasarkan arahan biro BRAP % Kualitas investigasi dilakukan penghubung berdasarkan arahan biro investigasi % Kualitas pelaksanaan sosialisasi kelembagaan di wilayah penghubung % Kualitas pengembangan dan pemeliharaan jejaring di lingkup wilayah penghubung % Kualitas pengelolaan BMN oleh penghubung % Kualitas pengendalian kegiatan dan keuangan pengelolaan kantor penghubung <p>Skor Eksternal didapat dari hasil survey kepuasan stakeholder (eksternal)</p> <p>Interval indeks menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A (86% - 100%), • B (71% – 85%), • C (56% – 70%), 	1. Rekapitulasi Hasil skor Internal 2. Rekapitulasi Hasil skor Eksternal 3. hasil Survei

BIRO UMUM

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
3	Meningkatnya kualitas layanan internal	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Skala IKPA digunakan pada rentang 1 s.d. 100, dengan masing-masing kategori berdasarkan besaran pengelolaan anggaran: <ul style="list-style-type: none"> • Pagu BESAR, • Pagu SEDANG • Pagu KECIL 	hasil penilaian kementerian keuangan
4		Tingkat kepuasan layanan keuangan	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Puas (86% - 100%), • Puas (71% – 85%), • Cukup Puas (56% – 70%), • Kurang Puas (41% - 55%) 	hasil survey
5		Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan	(Jumlah sarana prasarana dipenuhi : Jumlah rasionalisasi kebutuhan unit kerja) x 100%	1. Rekapitulasi jumlah sarana prasarana dipenuhi 2. Rekapitulasi Jumlah rasionalisasi kebutuhan unit kerja
6		Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, rumah tangga]	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Puas (86% - 100%), • Puas (71% – 85%), • Cukup Puas (56% – 70%), • Kurang Puas (41% - 55%) 	hasil survei
7		Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	Skor ANRI menggunakan 5 kategori, dengan masing-masing kategori merupakan akumulasi dan rata-rata nilai kinerja para pemegang JFT Arsiparis , yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Baik (91 - ke atas), • Baik (76 - 90), • Cukup (61 – 75), • Kurang (51 - 60) • Buruk (50 ke bawah) 	penilaian ANRI

BIRO UMUM

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
8	Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM	Nilai Sistem Merit	Nilai sistem Merit menggunakan 4 kategori, dengan Kategori - Nilai - Sebutan , sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• IV - 325 s.d. 400 - Sangat Baik• III - 250 s.d. 324 - Baik• II - 175 s.d. 249 - Kurang• I - 100 s.d. 174 - Buruk	hasil penilaian sistem merit
9		Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Sangat Puas (86% - 100%),• Puas (71% – 85%),• Cukup Puas (56% – 70%),• Kurang Puas (41% - 55%)	hasil survei
10	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Sangat Puas (86% - 100%),• Puas (71% – 85%),• Cukup Puas (56% – 70%),• Kurang Puas (41% - 55%)	hasil survei

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

BIRO REKRUTMEN, ADVOKASI, DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Terselenggaranya rekrutmen CHA dan Cakim Adhoc di MA yang andal	Persentase CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan	Jumlah CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan/jumlah CHA dan/atau Calon Hakim Ad hoc di MA yang mendaftar x 100%	1. Rekapitulasi jumlah CHA yang mendaftar 2. Replitulasi jumlah CHA yang lulus uji kelayakan
2	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim	Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim	jumlah hakim yang dilatih/jumlah hakim ada di Indonesia x 100%	1. Rekapitulasi jumlah yang dilatih 2. Replitulasi jumlah hakim yang ada di Indonesia
		Persentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH	jumlah hakim yang berkarakter/jumlah hakim yang dilatih x 100%	1. Rekapitulasi jumlah yang dilatih 2. Replitulasi jumlah hakim yang memenuhi kriteria berkarakter
3	Meningkatnya layanan Advokasi Hakim	Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim	jumlah laporan yang diselesaikan / jumlah laporan yang masuk x 100%	Rekapitulasi jumlah laporan perbuatan merendahkan hakim

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

BIRO INVESTGASI

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Persentase database rekam jejak hakim yang valid dan terpetakan	Jumlah database rekam jejak hakim yang valid dan terpetakan/ laporan rekam jejak x 100%	1. Rekapitulasi jumlah database rekam jejak hakim yang valid dan terpetakan 2. Repitulasi jumlah laporan rekam jejak
2	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini	Tingkat kualitas data deteksi dini	Jumlah data deteksi dini/Jumlah data bernilai A1 x 100%	1. Rekapitulasi jumlah data yang bernilai A1 2. Repitulasi jumlah data deteksi dini
		Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi DD yang ditindaklanjuti/ rekomendasi DD x 100%	1. Rekapitulasi jumlah rekomendasi deteksi dini 2. Rekapitulasi jumlah rekomendasi deteksi dini yang ditindaklanjuti
3	Terlaksananya kegiatan Pendalaman kasus tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	Jumlah Pendalaman Kasus tertentu yang ditindaklanjuti/Jumlah Pendalaman Kasus tertentu x 100%	1. Rekapitulasi jumlah pendalaman kasus 2. Rekapitulasi jumlah pendalaman kasus yang ditindaklanjuti

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Terlaksananya penelitian dan pengkajian akuntabilitas hakim dan peradilan	% rekomendasi penelitian dan pengkajian ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti : Jumlah total rekomendasi) x 100%	1. Rekapitulasi jumlah rekomendasi penelitian dan pengkajian 2. Rekapitulasi jumlah rekomendasi penelitian dan pengkajian yang ditindaklanjuti
2	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	Persentase pengembangan aplikasi yang terintegrasi	(Hasil TIK yang berhasil diintegrasikan : Hasil TIK yang harus diintegrasikan (target)) * 100%	1. Rekapitulasi jumlah TIK yang terintegrasi 2. Rekapitulasi jumlah target TIK yang harus diintegrasikan
		Persentase pemutakhiran data informasi dan infrastruktur IT	(Hasil data yang berhasil dimutakhirkan : Hasil data yang harus dimutakhirkan (target)) * 100%	1. Rekapitulasi jumlah TIK yang dimutakhirkan 2. Rekapitulasi jumlah target TIK yang harus diintegrasikan
3	Tersedianya sistem manajemen keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	Hasil penilaian akan berujung pada 2 hasil : Sesuai atau tidak sesuai dengan standar ISO 27001	standar hasil penilaian ISO 27001
4	Meningkatnya pelaksanaan edukasi publik dalam membangun integritas hakim	Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	(Jumlah orang/lembaga yang terdampak publikasi : Jumlah target publikasi) x 100%	1. Rekapitulasi jumlah orang/lembaga yang terdampak publikasi 2. jumlah target publikasi
		Persentase publik yang memahami pentingnya integritas hakim	(Jumlah orang/lembaga yang sampai pada level paham : Jumlah orang/lembaga yang mengikuti edukasi) x 100%	1. Rekapitulasi jumlah orang/lembaga yang sampai pada level paham 2. Rekapitulasi jumlah orang/lembaga yang mengikuti edukasi

PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
5	Telaksananya Efektivitas Komunikasi Publik melalui media maupun langsung	Kategori layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Nilai KIP menggunakan 5 kategori, berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Informatif [90 - 100] • Menuju Informatif [80 - 89,9] • Cukup Informatif [60 - 79,9] • Kurang Informatif [40 - 59,9] • Tidak Informatif [< 39,9] 	hasil penilaian KIP
		Kategori Publisitas Media Monitoring	(Jumlah terbanyak kategori pemberitaan minimum sebanyak 65% dari total pemberitaan) Kelompok kategori penilaian tones, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tones negatif yang cenderung pada penolakan & Kecaman; 2. Tones negatif yang cenderung pada sindiran / ketidaksepakatan; 3. Tones netral yang sebagian besar lebih mempertanyakan ide/memperjelas maksud; 4. Tones netral berupa Klarifikasi 5. Tones netral berupa Pengumuman/Pemberitahuan/Pemberitaan kegiatan 6. Tones positif yang berisi kritik membangun. 7. Tones Positif berupa dukungan/apresiasi/saran/harapan dan justifikasi argumen gagasan; 	Rekapitulasi jumlah pemberitaan

PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Sangat Puas (86% - 100%),• Puas (71% – 85%),• Cukup Puas (56% – 70%),• Kurang Puas (41% - 55%)	hasil survei

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

NO	SASARAN	IKU	PENJELASAN	
			Formulasi Hitung	Sumber Data
1	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang berkualitas	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	Jumlah laporan masyarakat yang diverifikasi/jumlah laporan masyarakat yang diterima x 100%	1. Rekapitulasi Laporan Masyarakat yang diverifikasi 2. Rekapitulasi Laporan Masyarakat yang diterima
		Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani	1. jumlah putusan hasil sidang/jumlah laporan masyarakat yang diregister pada tahun berjalan 2. jumlah putusan hasil sidang/jumlah laporan masyarakat yang diregister pada tahun sebelumnya = $(\Sigma 1+2)/2 \times 100\%$	1. Rekapitulasi jumlah laporan masyarakat yang di registrasi (total register) 2. Jumlah Dokumen hasil sidang (Putusan Sidang Pleno)
2	Terselenggaranya Pemantauan Peradilan	Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan Peradilan	Jumlah hakim yang mematuhi KEPPH/jumlah hakim yang dipantau x 100%	Rekapitulasi data hakim yang mematuhi KEPPH
		Persentase temuan dugaan pelanggaran KEPPH dalam penyelenggaraan Peradilan	jumlah temuan/jumlah pelaksanaan pemantauan x 100%	1. Rekapitulasi laporan pelaksanaan pemantauan 2. Rekapitulasi temuan pelanggaran KEPPH
3	Tersedianya data pemetaan integritas hakim berdasarkan putusan sidang pleno	Persentase data integritas hakim	Jumlah data integritas hakim/jumlah hakim yang ditangani x 100%	1. Rekapitulasi data integritas hakim 2. Rekapitulasi data hakim